

PEMBANGUNAN MANUSIA dan PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA*)

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

(Guru Besar Sosiologi Pendidikan UNS Solo dan Staf Khusus Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI)

Pendahuluan

Modernisasi (dan anaknya yaitu sistem informasi digital) telah berkembang luar biasa maju. Produk-produk digital telah berhasil menembus kodrat zaman, waktu, dan ruangnya. Teknologi *cybernetic* telah berhasil menjadi sumber informasi, sumber rujukan, wahana dan laboratorium tempat berbagai golongan dan kelompok orang bertemu dan berinteraksi. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan teknologi digital telah merebut posisi manusia sebagai produsen budaya, termasuk manusia Indonesia.

Di balik capaian yang mengagumkan itu, terselip rasa cemas dan timbul pertanyaan besar. Mengapa justru semakin banyak manusia merasa gagal karena merasa hidup dalam kekosongan makna? Kondisi tersebut telah melahirkan dampak sosok soliter dan apatis, *gaps* kemiskinan yang semakin melebar, ketimpangan sosial, dekadensi moral yang akut dan patologis (Soenarto, 1993). Dalam keadaan tersebut tidak semua orang mampu menyelami hidup yang begitu cepat berubah. Kualitas moral dan mental, nama baik serta reputasi yang menjadi penanda diri seseorangpun juga bisa luntur akibat modernisasi tersebut.

Sesungguhnya, kita hidup juga dikelilingi dengan nilai-nilai budaya yang menyatu sebagai miliknya dalam keseharian kehidupan. Bahkan hampir semua komunitas atau lokalitaspun masing-masing mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut sesuai kebutuhannya sebagai “alat” agar bisa bertahan hidup bahkan mampu mengembangkannya. Namun, apakah nilai-nilai budaya yang menyatu sebagai miliknya tersebut telah berperan dalam dirinya, disitulah letak masalahnya.

*) Disampaikan dalam FORUM 2045 (Simposium Nasional: Manusia Indonesia, Pendidikan dan Kebudayaan), Online Kamis 8 April 2021.
Naskah ini sebagian dimodifikasi dari makalah penulis yang pernah disampaikan dalam Seminar Internasional: “Character Development in the 21st Century Education” Universitas PGRI Yogyakarta, 20 Juli 2017 (sebelumnya dalam versi Bahasa Inggris).

Sementara itu dalam upaya pembangunan nasional, titik sentralnya adalah pada pembangunan manusia sebagai komponen paling penting untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai kualitas manusia yang unggul, bermutu, bermartabat dan berdaya saing tinggi agar bisa mengelola seluruh sumberdaya Indonesia. Itulah kondisi yang bisa dibentuk oleh lingkungan seseorang di mana ia mulai tinggal, lalu berada dan berkembang, termasuk di dalamnya oleh proses pendidikan.

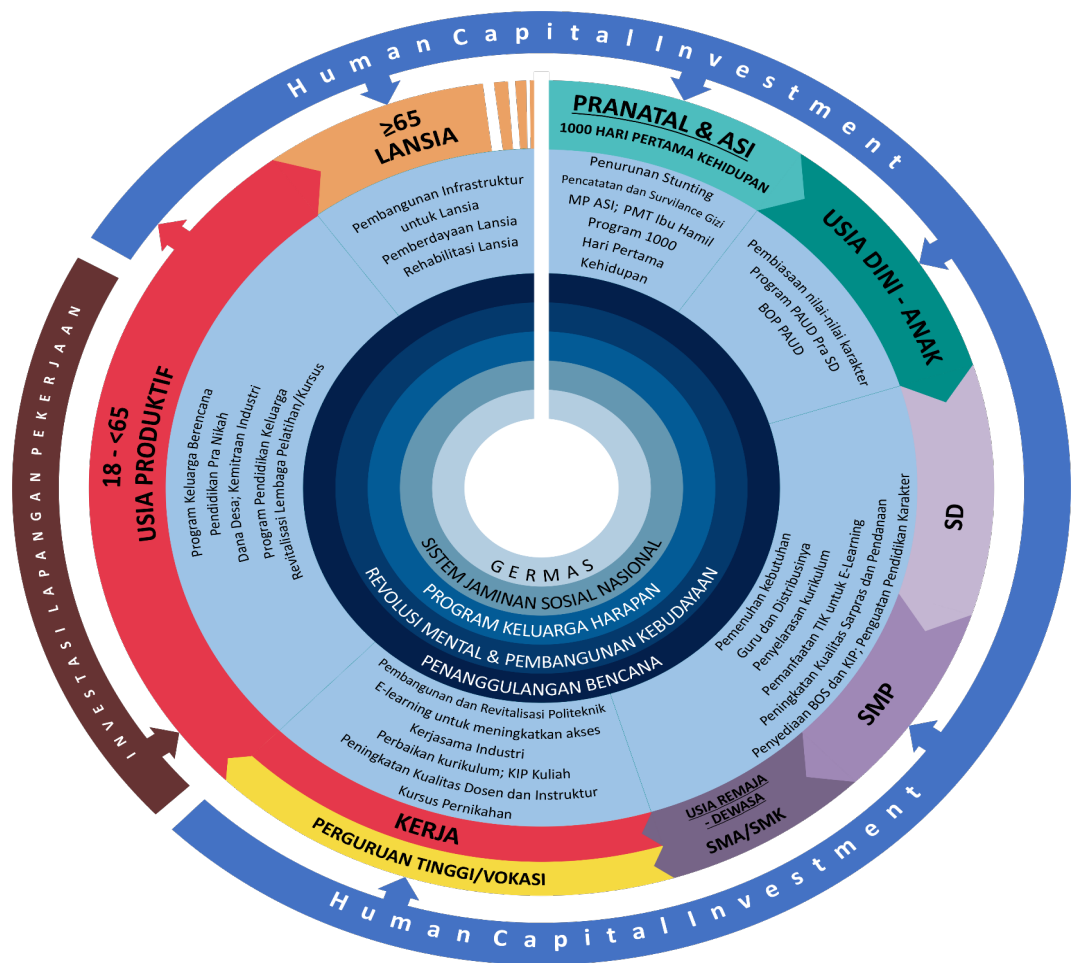
Renungan kita adalah masihkah ada jawaban dan jalan keluarnya, bagaimana manusia Indonesia dibentuk/diberikan pendidikan dengan berbasis budaya? Tulisan ini juga berusaha menjelaskan pentingnya manifestasi budaya dalam proses pendidikan di Indonesia pada umumnya.

Pembangunan Manusia Indonesia

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan manusia Indonesia adalah untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, trampil dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif bagi semua penduduk.

Siklus tersebut tergambar (lihat Gambar: 1) yang dimulai dari kehidupan 1000 hari pertama kehidupan (masa prenatal dan ASI), usia dini dan anak, masa sekolah (dari sekolah dasar, sekolah menengah SMP/SMA-K, usia remaja dan menjelang dewasa), perguruan tinggi/vokasi/masuk lapangan kerja, usia produktif kerja hingga lansia.

Strategi pembangunan manusia Indonesia dilihat sebagai bagian dari upaya “human capital investment” dan investasi lapangan pekerjaan dengan seluruh program-programnya yang disiapkan/difasilitasi secara bersama oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (termasuk swasta/dunia industri dan dunia usaha).



Gambar 1: Siklus Pembangunan Manusia

Babak Baru Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia terbentuk dari beraneka ragam budaya etnik yang merupakan hasil budidaya suku-suku bangsa yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Di antara warna-warni suku bangsa, adat, dan tradisi itu terdapat garis merah yang menunjukkan persamaan spirit, sikap, dan pandangan hidup berbangsa. Kebudayaan Indonesia pada konteks kehidupan berbangsa juga menjadi pengawal proses transfer menuju peradaban yang lebih baik, lebih maju, dan harmonis (Sutarja, 2000). Pada gilirannya diharapkan kebudayaan tersebut mampu menjamin kualitas dan kesinambungan hidup manusia Indonesia. Kualitas hidup yang sinambung menurut Kras (1995) membutuhkan kecakapan sikap dan kesantunan perilaku yang mewujudkan ke

dalam sosok pribadi masyarakat Indonesia yang matang, cerdas, kreatif, jujur, dan berkarakter.

Kebudayaan senantiasa bergerak dan berubah sepanjang kehidupan itu sendiri. Setiap kurun zaman, kebudayaan selalu melahirkan lambang dan simbol “medan pertarungan” di mana begitu banyak makna dan ideologi berebut perhatian publik dan seterusnya membentuk kesadaran, memori, dan daya bawah sadar masyarakat. Hingga pertengahan abad 20, masyarakat Indonesia mengalami tiga kategori zaman, yaitu kategori tradisional patrimonial (mitis-komunal), kapitalis (realis-individual), dan teknokratis (pseudo-realis). Menjelang abad 21, kebudayaan Indonesia memasuki era digital sepenuhnya. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mendobrak cara pandang konvensional menjadi super-digital. Wilayah Indonesia yang begitu luas digerakkan dari nadi teknologi nir-kabel *cybernetic-virtual*. Dalam kondisi tersebut, kini masyarakat Indonesia bergerak cepat menuju simbol baru yang soliter-impersonal. Tak pelak, perilaku budaya kita menjadi limbung menghadapi perubahan yang begitu sangat cepat ini.

Selanjutnya, kebudayaan memasuki *an ever-moving era* ‘zaman yang serba bergerak’. Kita memasuki siklus gagasan dan tindakan yang tidak mengenal putus, eksperimen yang nyaris tiada henti (Eliot, 1984). Pada zaman ini ideologi dan warisan nilai kearifan hidup yang dianggap “agung” sering dimaknai secara sinis sebagai narasi lama yang perlu dirombak total dan dihancurkan secara membabi buta. Gaya hidup yang serba cepat, praktis, dan instan lebih mendapat tempat di hati masyarakat ketimbang “laku” hidup yang panjang berliku-liku dan melelahkan. Situasi ini didukung oleh perkembangan dunia media nasional. Media –di satu sisi– menjadi ujung tombak kemajuan, namun di sisi lain media menjadikan manusia sekadar sebagai komoditas (Loomba, 2016) yang dapat diperjualbelikan, ditawarkan, ditukar, dan dipoles selayaknya barang baru (padahal stok lama).

Kini, kebudayaan berdiri di tengah zaman *post-truth era*. Rentang zaman yang oleh Keyes (2004) digambarkan sebagai masa yang semakin susah mengais kebenaran sejati, kecuali berondongan informasi yang jauh dari jejak

fakta objektif. Di dalam konteks kebudayaan, bentuk-bentuk ‘penguasaan’ baru telah lahir untuk tidak hanya pengendalian sistem pemerintahan, ekonomi, dan energi, melainkan untuk penguasaan “sistem nilai budaya” dari suatu bangsa lain. Dalam kalimat pendek adalah “membudayakan budaya bangsa lain”. Dalam konteks budaya global kita kenal apa yang disebut globalisasi. *Neo-Colonialism* mendapatkan pengertiannya yang baru di era *Post-Truth*. Ambisi ekspansi budaya ke wilayah budaya bangsa lain dilakukan dengan cara membiaskan nilai-nilai budaya lokal dan menindihnya dengan konstruk budaya baru, serta memisahkan spirit generasi mudanya dari sejarah bangsa dan akar budayanya sendiri (Eagleton, 2000). *Spirit* mitologis dan legenda lokal dihancurkan secara sistematis dengan mitos-mitos post-modern, nilai filosofis warisan leluhur terdepak oleh fenomena permainan *simulacrum* yang membunuh makna (Baudrilard, 1983).

Dampaknya juga terasa di dalam sistem pendidikan nasional kita. Upaya peningkatan kualitas pendidikan selalu diidentikkan dengan penambahan jam pelajaran di sekolah, pengertian sekolah disederhanakan dengan “kelas”, pekerjaan rumah siswa yang merampas waktu bermain, berkurangnya kesempatan memanjat pohon, membaca sajak, melukis, dan berbagai aktivitas rekreatif anak-anak yang kini telah tidak kunjung terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Akhirnya, banyak kejadian bahwa anak-anak kita mulai tercerabut dari akar budayanya. Mereka terjauhkan dari lingkungannya dan mereka tidak menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi dan meniru seperti orang lain (khususnya Barat yang menjadi kiblat kemajuan).

Kebudayaan dan Sistem Nilai

Membicarakan tentang kebudayaan akan terus menerus mendapatkan pengertiannya secara dimensional berdasarkan konteks waktu, ruang, dan kebutuhan (*activity*). Terminologi kebudayaan akan selalu mengikuti pola dan sistem adaptasi masyarakat di dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka meningkatkan kualitas seluruh dimensi kehidupan manusia.

“Memanusiakan manusia” adalah kata kuncinya sekaligus menjadi visi budaya yang menyentuh naluri dasar setiap manusia, kemudian berkembang secara sistemik menjadi perilaku dan norma komunal, serta berpola menjadi sistem peri-kehidupan suatu masyarakat. Artinya, kebudayaan adalah perilaku sistematis untuk membangun **sistem nilai** sebagai panduan menjalani kehidupan dari generasi ke generasi dalam suatu wilayah budaya.

Sistem nilai budaya selalu mengacu pada kearifan masa lampau. Masa lampau adalah referensi dan bahan baku untuk mengembangkan struktur dan tekstur masa depan kehidupan. Itulah kemudian muncul kearifan lokal yang dapat ditelusuri dari nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus berperilaku dari suatu komunitas budaya. Ketika satu generasi sudah mulai mengabaikan kearifan lokal budayanya yang positif dari pendahulunya, itu berarti tanda bahwa peri-kehidupan di wilayah itu sudah mulai rapuh. Dan, jika kondisi tersebut dibarengi dengan datangnya gelombang era pembudayaan budaya bangsa lain, hasilnya tentu dapat dibayangkan, keadaan suram suatu bangsa karena menjadi “boneka” bangsa lain. Bangsa yang demikian itu hidup di atas panggung pertunjukan dunia yang *scenario* dan *ending* ceritanya ditentukan oleh bangsa lain. Merekalah bangsa yang telah kehilangan identitasnya, bangsa yang kehilangan karakternya sebagai bangsa. Inilah yang sedang kita alami dengan globalisasi (proses melokalkan era pembudayaan/nilai-nilai bangsa lain).

Kesadaran terhadap kearifan kebudayaannya tersebut adalah “sistem nilai” yang harus kembali diaktifkan. Kesadaran bahwa sistem nilai budaya (yang kemudian menjadi kearifan lokal) yang telah dibangun oleh para pendahulu bukanlah metoda pragmatis temporal, melainkan telah teruji oleh berbagai kondisi zaman dari generasi ke generasi. Tradisi dan kearifan lokal bukanlah hambatan bagi seseorang untuk mengikuti pergaulan dengan tatanan dunia modern, namun hanya perlu disusun suatu “model sosial baru” atau perlunya *re-social engereining* sehingga mampu diwujudkan tipe ideal masyarakat Indonesia dengan identitas nasional. Kebudayaan yang diwarisi dan dipakai adalah sistem nilai yang relevan dan dianggap paling tepat untuk konteks ruang

budayanya, sehingga bentuk-bentuk penguatannya itu pada dasarnya adalah sebagai “strategi adaptif” untuk akselerasi pada konteks waktunya.

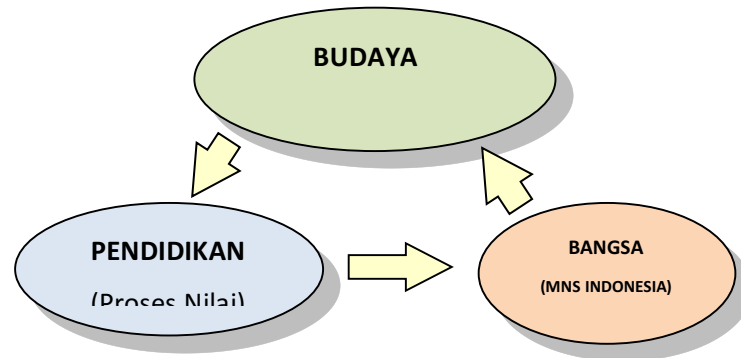
Sudah saatnya kita memulai dan terus menerus mengembangkan paradigma dalam mengglobalkan budaya lokal terpilih (glokalisasi) sebagai bangsa yang kaya dengan budaya dan nilai-nilai luhur, sudah saatnya kita bertindak mengglobalkannya (Karsidi, 2016). Tindakannya bersifat lokal tetapi dampaknya bisa global. Itulah yang dimaksud tindakan berbasis budaya. Misalnya, melalui teknologi informasi/digital harus dijadikan kemudahan oleh manusia dalam mengenalkan budayanya. Dengan adanya pengenalan terhadap budayanya tersebut, maka akan tercipta pengembangan nilai-nilai luhur dalam memperkokoh jati diri bangsa. Nilai-nilai lokal seperti kerukunan, gotong royong, keramahan, kejujuran, keberanian, keuletan, kerja keras, sangat penting untuk dikokohkan sebagai rujukan nilai global.

Manusia Indonesia, Pendidikan dan Budaya.

Sistem nilai budaya kita telah memahat sejarah panjang peradaban etnik nusantara hingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi alam Indonesia yang berlimpah ruah tiada duanya di belahan dunia manapun. Ribuan pulau, adat-istiadat, seni dan budaya lokal yang telah teruji menembus kodrat zaman, adalah potensi mengagumkan untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang unggul. Pada konteks pembangunan nasional, diperlukan strategi “pengelolaan pemahaman” bahwa kita memiliki *asset* budaya sebagai sistem nilai yang kaya.

Lalu, sepatutnya strategi pendidikan yang diterapkan juga harus berbasis budaya. Dengan demikian, keunggulan bangsa akan tercapai dengan sendirinya jika kita mampu mengelola potensi budaya sebagai “sistem nilai” secara optimal. Strategi pendidikan berbasis budaya sebagai proses nilai adalah kemampuan meningkatkan standar nilai potensi budaya manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah yang disebut sebagai kecerdasan budaya bangsa.

Jadi, kecerdasan budaya bangsa adalah kesigapan dan kecerdasan dalam mengelola budaya lokal dalam skala Nasional dan Internasional, yang di dalamnya termasuk menyangkut respon-kompetitif dan kerja-sama Internasional.



Skema 1. Kaitan antara Bangsa (Mns Indonesia), Pendidikan dan Budaya

Mencermati kembali visi Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka tiga kata itu menjadi rumusan kebangsaan yang harus dicerna secara mendalam. Secara esensial, (1) mencerdaskan adalah “pemikiran”, (2) kehidupan adalah “pemahaman”, dan (3) bangsa adalah “kesadaran”. Secara substansial, maka “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” adalah strategi pemikiran (pendidikan) untuk pengelolaan sistem nilai kehidupan (termasuk kebudayaan lokal), dalam rangka membangun kesadaran bangsa yang memiliki potensi “unggul” di antara bangsa-bangsa lain.

Kini, saatnya kita membuka cakrawala pendidikan dengan memperlakukan sekolah dan proses pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial-budaya. Faktanya memang terjadi saling keterkaitan dan ketergantungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dimana pendidikan berkorelasi dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial (Karsidi, 2013).

Strategi Pendidikan Berbasis Budaya

Beberapa contoh nilai kearifan budaya (misal: salah satu budaya Jawa yang sudah menjadi budaya nasional), untuk memasuki abad XX spirit dasar

pendidikan kebangsaan telah dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, yang dalam perkembangannya telah diadopsi menjadi motto pendidikan nasional, yaitu:

<i>ing ngarso sung tuladha</i>	(‘di depan memberikan contoh’)
<i>ing madya mangun karsa</i>	(‘di tengah memberikan semangat’)
<i>tut wuri handayani</i>	(‘di belakang memberikan kekuatan’)

Demikian juga tentu masih banyak contoh nuansa nilai budaya dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menjadi cerminan pola pendidikan yang berbasis budaya pada masa dulu, tetapi saat ini digunakan untuk lingkup praktek pendidikan secara nasional. Dengan nuansa tersebut pola pendidikan yang mendekatkan anak dengan dunianya, menempatkan sekolah sebagai zona ramah anak, dan sekolah sebagai rumah kedua anak yang bisa memberi keleluasaan untuk membentuk identitas dan jati diri anak.

Pada akhirnya, pola pendidikan nasional (sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945) seharusnya akan lebih condong sebagai ‘strategi pencerdasan’ yang kaya nilai dan bukan sekedar sebagai ‘metode pemintaran’ belaka yang kaku, beku, dan kering, tetapi juga sebagai sistim pembentukan karakter peserta didik.

Kiranya penting untuk direnungkan kembali, apakah proses pendidikan kita saat ini sudah sesuai harapan? Beberapa kasus di lapangan, sejak tahun pertama anak-anak Sekolah Dasar sudah dituntut menghafal hitungan, harus lancar membaca, menanggung beban setumpuk pekerjaan rumah (PR) setiap pulang sekolah, dan beban traumatik terus menumpuk dari jenjang ke jenjang pendidikan. Mimpi anak-anak untuk bermain, bernyanyi, dan berteman dalam kepolosan telah tereliminasi oleh kegiatan lainnya. Kesempatan anak mengenal tembang-tembang daerahnya, permainan anak, dan tarian tradisonal terganjil oleh tuntutan nilai ujian kenaikan kelas dan kelulusan, dan hal-hal lain sejenis yang menjadi penyumbang trauma tersendiri. Akibatnya, bangku sekolah menjadi “pilihan tanpa pilihan”, dan bukan ‘ruang pembebasan dan pendewasaan pola pikir’ anak. Boleh jadi, mereka lalu pintar dan tajam rasionalitasnya, tetapi tumbuh sebagai pribadi yang sulit menerima perbedaan, soliter, bersaing dengan segala cara, fanatik dan dogmatik, sehingga

kemudian mereka acuh-takacuh untuk urusan kebangsaan karena asyik dengan urusannya sendiri.

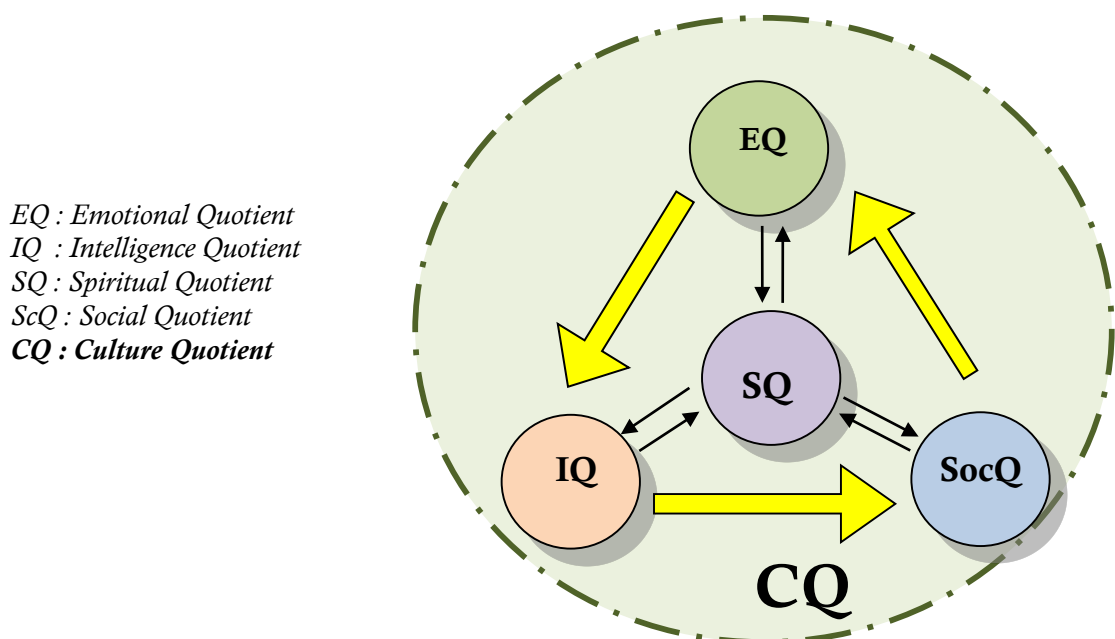
Beranjak dari situasi seperti itu, maka diperlukan strategi pendidikan yang berbasis budaya yang setidaknya menganut tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut:

1. **Prinsip kemandirian**, yaitu strategi pendidikan yang menumbuhkan sikap mandiri berdirinya masyarakat, sehingga mampu menyiapkan diri dan meningkatkan kualitas internal secara organis sesuai dengan situasi dan kondisi yang semakin beragam.
2. **Prinsip pembaharuan diri**, yaitu strategi pendidikan yang menumbuhkan integritas nasional, kemampuan untuk terus-menerus beradaptasi, meluaskan kerjasama, saling mengisi, dan bersinergi sesuai kompetensi dan kualitas permasalahan yang semakin kompleks.
3. **Prinsip keunggulan diri**, yaitu strategi pendidikan yang menumbuhkan sikap percaya diri dan kemampuan hidup yang kreatif dan inovatif, sehingga tercipta generasi unggul yang memiliki kemampuan dan komitmen menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah percaturan masyarakat dunia.

Sedangkan **strategi pendidikan yang berbasis budaya** dengan meminjam istilah Eagleton (2000) sebagai pencerdasan bangsa adalah suatu sistem holistik yang mampu mensinergikan seluruh aspek kecerdasan. Dalam konsepsi paedagogis setiap pribadi memiliki potensi tiga bentuk kecerdasan, yaitu (1) Kecerdasan Intelegensi (*IQ*), (2) Kecerdasan Emosional (*EQ*), dan (3) Kecerdasan Spritual (*SQ*). Jika ketiganya dikelola secara sinergis dan seimbang, maka akan berpotensi bisa membangun Kecerdasan Sosial (*SocQ*). Namun, dalam pengamatan penulis, tampaknya pola pengelolaan ketiga potensi kecerdasan paedagogis tersebut di atas pada saat ini masih belum/kurang tepat, sehingga justru memunculkan friksi antar bentuk yang kurang menyenangkan, yaitu bentuk yang lebih mengedepankan egoisme

rasionalitas, bentuk yang menghasilkan emosionalisme praktis, dan bentuk kecerdasan yang mengedepankan fanatisme intoleran.

Begitulah yang akan terjadi jika pengelolaan potensi kecerdasan dalam dunia pendidikan ‘salah porsi dan formasi’. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika ketiga potensi kecerdasan paedagogis tersebut dipahami sebagai sumber daya secara parsial, fragmentaris, dan bukan relasi interaksional sinergis-mutualistis satu dengan yang lain. Karena itu, maka penulis mengusulkan pola pengelolaan kecerdasan paedagogis tersebut (EQ, IQ, dan SQ) dikelola secara sinergis dan seimbang, sehingga akan bisa membangun Kecerdasan Sosial (*Social Quotion=SocQ*) dalam bingkai budaya (*Cultural Quotion=CQ*), seperti dalam skema Pengelolaan Kecerdasan Berbasis Budaya, sebagai berikut:



Skema 2. Pengelolaan Kecerdasan Berbasis Budaya

Berdasarkan Skema 2. di atas dapat diidentifikasi 3 (tiga) prinsip pengelolaan kecerdasan berbasis budaya, yaitu:

1. Prinsip pertama, Kecerdasan Emosional (*EQ*) seharusnya menjadi landasan dasar Kecerdasan Intelegensi (*IQ*). Bukan terbalik. Oleh karena itu, setiap tahapan pembentukan *IQ* selalu didasari nafas *EQ*.

2. Prinsip kedua, sinergi antara kecerdasan *EQ* dan kecerdasan *IQ* adalah sumber daya untuk membangun Kecerdasan Sosial (*SocQ*) sehingga setiap interaksi sosiologis adalah kualitas interaktif antarperson yang dibentuk oleh hasil sinergi antara *EQ* dan *IQ*.
3. Prinsip ketiga, masing-masing *EQ*, *IQ*, dan *SocQ* bukanlah wilayah kecerdasan yang parsial dan independen, melainkan “proses siklus” dan harus selalu memiliki interaksi yang inten dengan Kecerdasan Spiritual (*SQ*), sehingga *SQ* bukanlah bentuk kecerdasan yang harus tampil praktis dan atraktif, tetapi justru menjadi sumber daya yang terimplementasi di dalam *EQ*, *IQ*, dan *SocQ*. Dengan kata lain, *SQ* adalah *power* yang menyublim di dalam siklus *EQ*, *IQ*, dan *SocQ*.

Posisi *EQ* selalu menjadi pijakan pertama pada setiap tahap pengelolaan siklus kecerdasan. Pada tahap pembentukan Kecerdasan Emosional itulah produk budaya dari generasi sebelumnya yang memiliki peran penting, karena hasil dari siklus sinergis yang berkelanjutan antara *EQ*, *IQ*, dan *ScQ* yang ditopang oleh *SQ* akan membangun ‘budaya baru’ yang tetap berpijak dari nilai-nilai luhur budaya sebelumnya. Ketika Kecerdasan Emosional telah berbasis budaya, maka Kecerdasan Intelegensipun tetap memiliki akar yang kuat dengan konteks budayanya. Begitu juga dengan Kecerdasan Sosial yang terbangun, akan sarat dengan nuansa nilai-nilai budaya yang adaptif dan kontekstual.

Proses produksi budaya baru dengan berpijak dari budaya melalui sistem pendidikan yang berbasis budaya, maka akan menghasilkan “kecerdasan budaya” bangsa atau kita sebut *Culture Quotient (CQ)*. Dengan demikian, apapun yang terjadi dalam perubahan peradaban, seberapa besar invasi/terpaan budaya asing, ketika kita mampu membangun mata-rantai budaya sebagai sistem nilai yang kuat dari generasi ke generasi, maka kita akan tetap menjadi bangsa yang kuat bahkan unggul dalam menghadapi segala tantangan zaman. Inilah suatu kondisi adaptif yang kita harapkan dari peserta didik.

PENUTUP: Kecerdasan Budaya adalah Pilar Keunggulan Bangsa.

Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki kecerdasan budaya yang ditandai oleh kemampuannya mengelola nilai-nilai kebajikan tradisi. Itu artinya, budaya secara substansial bukanlah nilai, melainkan “sistem nilai” yang menampilkan beragam nilai yang berpola. Jika sistem nilai kebudayaan suatu bangsa kuat, maka apapun dan bagaimanapun yang terjadi dengan kondisi dan perubahan zaman, akan dapat dipastikan bangsa itu cukup mudah untuk mengelola perubahan itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi kehidupannya. Kecerdasan budaya bukanlah mengusung budaya lama untuk diterapkan apa adanya dalam kehidupan sekarang, melainkan mengelola nilai-nilai budaya lama sebagai *asset* kebangsaan. Di sinilah pentingnya kemampuan adaptasi dengan melakukan kontekstualisasi budaya lama dalam praktek kekinian.

Sistem pendidikan yang berbasis budaya adalah strategi pencerdasan bangsa untuk mempersiapkan generasi unggul yang memiliki kewenangan penuh atas bangsanya. Sebuah generasi yang berdiri tegak dan berakar kuat di tanah budaya warisan leluhurnya, tidak mudah goyah oleh konspirasi global, yang mampu menentukan nasibnya sendiri karena cerdas mengelola budayanya menjadi bangsa yang unggul. Dalam konteks ini pendidikan berbasis budaya mengemban dua tugas utama, yaitu (1) meningkatkan potensi, daya kekuatan, dan keunggulan insani, dan (2) mengawal proses transfer nilai-nilai kebudayaan secara berkelanjutan (berkesinambungan).

Harus ada upaya antisipatif yang cepat dan tepat dengan mengangkat nilai dan kecerdasan budaya sebagai pemandu ke arah masa depan yang lebih baik. Kecerdasan budaya akan melahirkan sikap budaya yang holistik, yaitu sikap paripurna dalam menjalani kehidupan yang bersandar pada nilai dan kebajikan tradisi. Dengan upaya tersebut, maka masyarakat tidak akan merasa kebingungan oleh karena kehilangan identitas. Hal ini disadari bahwa kedirian (*self*) yang terus-menerus tergerus akan bisa berakibat kepada susahnyanya kemampuan mengaktualisasikan diri.

Dapat dibayangkan jika bangsa kita salah dalam menyikapi kebudayaannya, maka kita akan menjadi masyarakat yang rapuh di tengah

pertarungan makna yang berakibat pada suramnya daya hidup, termasuk hilangnya nilai-nilai keluhuran, rontoknya nilai kebersamaan (seperti *guyub-gotong royong*) yang menjadi ciri budaya warisan kita di Indonesia pada umumnya. Akibatnya, landasan agama, nilai-nilai, dan keyakinan hidup juga akan semakin mudah memudar. Disinilah maka kecerdasan budaya akan menjadi pilar keunggulan bangsa.

Saatnya kini, kita perlu melakukan gerakan nasional untuk kembali menggali dan menguatkan nilai budaya, jati diri dan identitas budaya nasional untuk mendukung praktek pendidikan kita menuju tercapainya keunggulan bangsa (*erka*).

PUSTAKA BACAAN:

- Baudrillard, J. (1983). *Simulations*. (Trans: Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitchman). USA: Semiotext[e].
- Eagleton, T. (2000). *The Idea of Culture*. Massachusetts USA: Blackwell Publisher Ltd.
- Eliot, T. S. (1984). *The Rock*. London: Faber & Faber.
- Karsidi, Ravik (2013). *Membangun Strategi Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Beberapa Pokok Pemikiran)*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, UNS Solo 7 Mei 2013.
- _____, (2016). *Budaya Lokal dalam Globalisasi (Upaya Mengglobalkan Lokalitas)*, Disampaikan dalam Seminar *Localizing Globalization*, FISIP UNDIP-HIPIIS, Semarang 5 September 2016.
- Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's.
- Kras, S. J. (1995). "Attitudes and Prediction of Behavior," *Personality and Social Psychology Bulletin*, Januari hal. 58-75.
- Loomba, A. (2016). *Kolonialisme – Pascakolonialisme*. Jakarta: Buku Seru.
- Soenarto, T. (1993). *Nilai Keterbukaan Budaya Tradisional Jawa (Makalah Sarasehan)*. Surabaya: Lembaga Javanologi.

Sutarja, I. (2000). Proses Nuansa sebagai Teknik Verifikasi dalam Psikolinguistik Idiosinkretik yang Humanistik. Jakarta: Depdikbud RI. (Prosiding Makalah Simposium, 11-13 September 2000).